

**MATRIKS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH  
TENTANG KERJA SAMADAERAH**

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN  |
|-----|--|---|---|
| 1.  | Menimbang:   | Menimbang:  |   |
|     | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;   | bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahanDaerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentangKerja Sama Daerah;  |   |
| 2.  | Mengingat:   | Mengingat:  |   |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5582) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> </ol> |   |
| 3.  | MEMUTUSKAN:  | MEMUTUSKAN:   |   |
|     | Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH.  | Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DAERAH.  |   |
|     | BAB I<br>KETENTUAN UMUM  | BAB I<br>KETENTUAN UMUM   |   |
| 4.  | Pasal 1  | Pasal 1   |   |
|     | <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</li> </ol>  | <p>Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:</p>   | PP No. 28/2018 tidak mendefinisikan frasa Pemerintah daerah   |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan/atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.</li> </ol>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerja Sama Daerah adalah usaha bersama antara daerah dan daerah lain, antara daerah dan pihak ketiga, dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.</li> </ol>  | Terdapat perbedaan definisi frasa Kerja sama daerah dari kesepakatan antar kepala daerah menjadi usaha bersama daerah |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN   |
|-----|---|--|--|
|     |   | 2. Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain, yang selanjutnya disingkat KSDD adalah usaha bersamayang dilakukan oleh daerah dengan daerah lain dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.   | PP No. 28/2018 mendefinisikan masing-masing jenis Kerja sama daerah (angka 2 s.d. angka 5) |
|     |   | 3. Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, yang selanjutnya disingkat KSDPK adalah usaha bersamayang dilakukan oleh daerah dengan pihak ketiga dalam rangka penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.  |  |
|     |   | 4. Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDPL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik. |  |
|     |   | 5. Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri, yang selanjutnya disingkat KSDLL adalah usaha bersama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.        |  |
| 3.  | Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.  |  |  |
| 4.  | Badan kerja sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil yang ditunjuk dari daerah yang melakukan kerja sama.  |  | PP No. 28/2018 tidak mengatur mengenai Badan kerja sama                                    |
| 5.  | Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh kepala daerah sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari kepala daerah kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama kepala daerah untuk menerima naskah kerja sama daerah, menyatakan persetujuan pemerintah daerah untuk mengikatkan diri pada kerja sama daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan kerja sama daerah. |  | PP No. 28/2018 tidak mendefinisikan frasa Surat Kuasa                                      |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN   |
|-----|---|---|--|
|     | 6. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pemerintahan dalam negeri.  | 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.   |  |
|     | BAB II<br>KERJA SAMA DAERAH   |   |  |
|     | Bagian Kesatu<br>Prinsip Kerja Sama   |   |  |
| 5.  | Pasal 2   |   |  |
|     | Kerja sama daerah dilakukan dengan prinsip:<br>a. efisiensi;<br>b. efektivitas;<br>c. sinergi;<br>d. saling menguntungkan;<br>e. kesepakatan bersama;<br>f. itikad baik;<br>g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;<br>h. persamaan kedudukan;<br>i. transparansi;<br>j. keadilan; dan<br>k. kepastian hukum. |   | PP No. 28/2018 tidak mengatur prinsip kerja sama daerah  |
|     |   | BAB II<br>KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN  |  |
|     | Bagian Kedua<br>Subjek Kerja Sama   | Bagian Kesatu<br>Subjek Hukum   |  |
| 6.  | Pasal 3   | Pasal 2   |  |
|     | Para pihak yang menjadi subjek kerja sama dalam kerja sama daerah meliputi:<br>a. gubernur;<br>b. bupati;<br>c. wali kota; dan<br>d. pihak ketiga.  | (1) Dalam pelaksanaan KSSD, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.<br>(2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani perjanjian kerja sama.<br>(3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. | kerja sama, penyelesaian perselisihan, dan berakhirnya kerja sama, serta hasil kerja sama, pada masing-masing jenis kerja sama daerah (pengaturan kerja sama daerah pada PP No. 28/2018 lebih rinci untuk setiap jenis kerja sama daerah, bila dibandingkan dengan pengaturan pada PP No. 50/2007) |
|     |   | Bagian Kedua<br>Kategori Kerja Sama   |  |
| 7.  |   | Pasal 3   |  |
|     |   | (1) KSSD dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.  |  |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
|     |  | <p>(2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.</p> <p>(3) Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.</p>  |            |
|     | <p>Bagian Ketiga<br/>Objek Kerja Sama</p>  | <p>Bagian Ketiga<br/>Objek Kerja Sama</p>   |            |
| 8.  | <p>Pasal 4</p>   | <p>Pasal 4</p>  |            |
|     | <p>Objek kerja sama daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.</p>        | <p>(1) Objek KSSD merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk terwujudnya kejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.</p> <p>(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Daerah dapat melaksanakan KSSD yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatasi kondisi darurat;</li> <li>b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau</li> <li>c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas pembantuan.</li> </ul> <p>(4) Objek dan pelaksanaan KSSD tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang undangan.</p> |            |
|     | <p>Bagian Keempat<br/>Bentuk Kerja Sama</p>  |   |            |
| 9.  | <p>Pasal 5</p>   |   |            |
|     | <p>Kerja sama daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.</p>  |   |            |
| 10. | <p>Pasal 6</p>   |   |            |
|     | <p>Perjanjian kerja sama daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip kerja sama dan objek kerja sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 4.</p> |   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     | BAB III<br>TATA CARA KERJA SAMA DAERAH  | Bagian Keempat<br>Koordinasi Teknis   |            |
| 11. | Pasal 7   | Pasal 5   |            |
|     | <p>Tata cara kerja sama daerah dilakukan dengan:</p> <p>a. Kepala daerah atau salah satu pihak dapat memprakarsai atau menawarkan rencana kerja sama kepada kepala daerah yang lain dan pihak ketiga mengenai objek tertentu.</p> <p>b. Apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima, rencana kerja sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. subjek kerja sama;</li> <li>2. objek kerja sama;</li> <li>3. ruang lingkup kerja sama;</li> <li>4. hak dan kewajiban para pihak;</li> <li>5. jangka waktu kerja sama;</li> <li>6. pengakhiran kerja sama;</li> <li>7. keadaan memaksa; dan</li> <li>8. penyelesaian perselisihan.</li> </ol> <p>c. Kepala daerah dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.</p> <p>d. Kepala daerah dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk kerja sama.</p> <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.</p> | <p>(1) Daerah yang akan melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) melakukan pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dan karakteristik daerah.</p> <p>(2) Pemetaan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh pemerintah daerah yang berbatasan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. koordinasi teknis di tingkat provinsi untuk KSSD yang dilakukan oleh antar daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau</li> <li>b. koordinasi teknis di tingkat nasional untuk KSSD yang dilakukan oleh antar daerah provinsi, antara daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi dan daerah kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda, dan antar daerah kabupaten/kota dari daerah provinsi yang berbeda.</li> </ol> <p>(3) Hasil pembahasan dalam koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama oleh kepala daerah yang bekerja sama.</p> |            |
| 12. | Pasal 8   |   |            |
|     | Pelaksanaan perjanjian kerja sama dapat dilakukan oleh satuan kerja perangkat daerah.   |   |            |
|     |   | Bagian Kelima<br>Tahapan dan Dokumen Kerja Sama   |            |
| 13. |   | Pasal 6   |            |
|     |   | <p>(1) Penyelenggaraan KSSD dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Persiapan;</li> <li>b. Penawaran;</li> <li>c. Penyusunan kesepakatan bersama;</li> </ol>   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN                                     |
|-----|---|--|--|
|     |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penandatanganan kesepakatan bersama;</li> <li>e. Persetujuan Dewan Perwakilan Daerah;</li> <li>f. Penyusunan perjanjian kerja sama</li> <li>g. Penandatanganan perjanjian kerja sama;</li> <li>h. Pelaksanaan;</li> <li>i. Penatausahaan; dan</li> <li>j. Pelaporan.</li> </ul> <p>(2) Persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan dalam hal rencana KSSD membebani masyarakat dan daerah dan/atau pendanaan dan belanja daerah tahun anggaran berjalan.</p> <p>(3) Kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf g merupakan dokumen KSSD.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan KSSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri.</p> |  |
|     | <b>BAB IV</b><br><b>PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH</b>  |  | Pengaturan mengenai persetujuan DPRD pada      |
| 14. | Pasal 9   |  | PP No. 28/2018 diatur                          |
|     | Rencana kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan ketentuan apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.                 |  | pada masing-masing Bab jenis kerja sama daerah |
| 15. | Pasal 10  |  |  |
|     | Kerja sama daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari satuan kerja perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  |  |  |
| 16. | Pasal 11  |  |  |
|     | (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap kerja sama daerah yang membebani daerah dan masyarakat, gubernur/bupati/wali kota menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian kerja sama kepala daerah kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memberikan penjelasan mengenai: |  |  |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tujuan kerja sama;</li> <li>b. objek yang akan dikerjasamakan;</li> <li>c. hak dan kewajiban meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. besarnya kontribusi Anggaran Pendapatan dan</li> <li>2. Belanja Daerah yang dibutuhkan untuk</li> <li>3. pelaksanaan kerja sama; dan</li> <li>4. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang,</li> <li>5. uang, atau jasa.</li> </ul> </li> <li>d. jangka waktu kerja sama; dan</li> <li>e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.</li> </ul> <p>(2) Surat gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen terkait.</p> <p>(3) Surat bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada gubernur dan Menteri serta Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait.</p>  |   |            |
| 17. | Pasal 12   |   |            |
|     | <p>(1) Rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dinilai oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.</p> <p>(2) Apabila rancangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menilai kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimasudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada kepala daerah.</p> <p>(3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian kerja sama dan menyampaikan kembali kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.</p> <p>(5) Gubernur wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada Menteri/Pimpinan Lembaga Non Departemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> |   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN  |
|-----|---|--|---|
|     | (6) Bupati/wali kota wajib menyampaikan salinan setiap perjanjian kerja sama kepada gubernur, Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah NonDepartemen terkait dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.   |  |   |
|     |   | Bagian Keenam<br>Kelembagaan Kerja Sama<br>Pasal 7   |   |
| 18. |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Kepala daerah dapat membentuk sekretariat kerja sama dengan penyelenggaraan KSSD.</li> <li>(2) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk dalam melaksanakan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) , dengan ketentuan kerja sama wajib tersebut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan secara terus menerus;</li> <li>b. memiliki kompleksitas tinggi; dan</li> <li>c. jangka waktu kerja sama paling singkat 5 (lima) tahun.</li> </ul> </li> <li>(3) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bekerja sama.</li> <li>(4) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bekerja sama.</li> <li>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri.</li> </ul> | PP No. 28/2018 mengatur pembentukan Sekretariat kerja sama apabila diperlukan |
|     | BAB V<br>HASIL KERJA SAMA   |  |   |
| 19. | Pasal 13  |  |   |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Hasil kerja sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau nonmaterial berupa keuntungan.</li> <li>(2) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan.</li> <li>(3) Hasil kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada pemerintah daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> |  |   |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     | BAB VI<br>PENYELESAIAN PERSELISIHAN   | Bagian Ketujuh<br>Penyelesaian Perselisihan   |            |
| 20. | Pasal 14  | Pasal 8   |            |
|     | (1) Apabila kerja sama antardaerah dalam satu provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:<br>a. musyawarah; atau<br>b. Keputusan Gubernur.<br>(2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.   | Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDD, penyelesaiannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan tata cara perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian perselisihan antardaerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. |            |
| 21. | Pasal 15  |   |            |
|     | (1) Apabila kerja sama daerah provinsi dengan provinsi lain atau antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi atau antara daerah kabupaten/kota dengan daerah kabupaten atau daerah kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:<br>a. musyawarah; atau<br>b. Keputusan Menteri.<br>(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat. |   |            |
| 22. | Pasal 16  |   |            |
|     | (1) Apabila kerja sama daerah dengan pihak ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian kerja sama.<br>(2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.   |   |            |
|     | BAB VII<br>PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH  |   |            |
| 23. | Pasal 17  |   |            |
|     | (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.<br>(2) Mekanisme perubahan atas ketentuan kerja sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.<br>(3) Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian kerja sama setingkat dengan kerja sama daerah induknya.  |   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
|     | BAB VIII<br>BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH  | Bagian Kedelapan<br>Berakhirnya Kerja Sama  |            |
| 24. | Pasal 18   | Pasal 9   |            |
|     | <p>Kerja sama daerah berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;</li> <li>tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;</li> <li>terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;</li> <li>salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;</li> <li>dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;</li> <li>muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;</li> <li>objek perjanjian hilang;</li> <li>terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau</li> <li>berakhirnya masa perjanjian.</li> </ol>        | <ol style="list-style-type: none"> <li>KSSD berakhir karena: <ol style="list-style-type: none"> <li>berakhirnya jangka waktu KSSD;</li> <li>tujuan KSSD telah tercapai;</li> <li>terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;</li> <li>terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan KSSD tidak dapat dilaksanakan; dan/atau</li> <li>objek KSSD hilang atau musnah.</li> </ol> </li> <li>KSSD tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan di daerah yang bekerja sama kecuali berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</li> </ol> |            |
| 25. | Pasal 19   |   |            |
|     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kerja sama daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan: <ol style="list-style-type: none"> <li>menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran kerja sama kepada pihak lain.</li> <li>pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerjasama.</li> </ol> </li> <li>Pengakhiran kerja sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek kerja sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sampai terselesaikannya objek kerja sama tersebut.</li> </ol> |   |            |
| 26. | Pasal 20   |   |            |
|     | Kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah.   |   |            |
| 27. | Pasal 21   |   |            |
|     | Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, kepala daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan kerja sama bertanggung jawab:  |   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     | a. menyimpan dan memelihara naskah asli kerja sama daerah; dan<br>b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerja sama daerah. |  |            |
|     |   | Bagian Kesembilan<br>Pengambilalihan Urusan Pemerintah Yang Dikerjasamakan<br>Pasal 10   |            |
| 28. |   | (1) Dalam hal ini kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.<br>(2) Dalam hal ini kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.  |            |
|     |   | (1) Dalam hal ini kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah provinsi, pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.<br>(2) Dalam hal ini kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan.  |            |
| 29. |   | Pasal 11   |            |
|     |   | (1) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilakukan setelah:<br>a. menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan menteri melakukan pembinaan kepala daerah provinsi yang bersangkutan; dan<br>menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian teknis berkoordinasi dengan Menteri melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib.<br>(2) Pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilakukan setelah:<br>a. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan kepada daerah kabupaten/kota yang bersangkutan<br>b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap kendala yang menyebabkan tidak terlaksananya kerja sama wajib; dan<br>c. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mendapatkan persetujuan menteri. |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | <p>(3) Biaya pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diperhitungkan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam peraturan menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri/kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait.</p>  |            |
|     |   | <p>Bagian Kesepuluh<br/>Bantuan Kerja sama Antar-Daerah</p>  |            |
| 30. |   | <p>Pasal 12</p>  |            |
|     |   | <p>(1) Pemerintah pusat dapat memberikan bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan kemampuan keuangan negara.</p> <p>(2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada daerah lainnya untuk melaksanakan kerja sama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah pada perangkat daerah sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Menteri.</p> |            |
|     |   | <p>BAB III<br/>KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA</p>   |            |
|     |   | <p>Bagian Kesatu<br/>Subjek Hukum</p>  |            |
| 31. |   | <p>Pasal 13</p>  |            |
|     |   | <p>(1) Dalam pelaksanaan KSDPK, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.</p> <p>(2) Gubernur atau bupati/wali kota dapat memberikan kuasa kepada pejabat di lingkungan perangkat daerah untuk menandatangani kontrak/perjanjian kerja sama.</p> <p>(3) Pejabat di lingkungan perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</p>   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 32. |   | Pasal 14  |            |
|     |   | Pihak ketiga yang dapat menjadi mitra dalam KSDPK terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perseorangan;</li> <li>b. Badan usaha yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan</li> <li>c. Organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum maupun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.</li> </ol>  |            |
|     |   | Bagian Kedua<br>Jenis Kerja Sama  |            |
| 33. |   | Pasal 15  |            |
|     |   | (1) KSDPK meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;</li> <li>b. Kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang membrkan pendapatan bagi daerah;</li> <li>c. Kerja sama investasi; dan</li> <li>d. Kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan</li> </ol> (2) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.<br>(3) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<br>(4) KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kerja sama dengan badan usaha berbadan hukum dalam penyediaan infrastruktur; atau</li> <li>b. kerja sama pengadaan barang dan jasa, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol> |            |
|     |   | Bagian Ketiga<br>Objek Kerja Sama   |            |
| 34. |   | Pasal 16  |            |
|     |   | (1) Objek KSDPK meliputi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.<br>(2) Daerah menetapkan prioritas objek KSDPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   | <p>(3) Daerah dapat melaksanakan KSDPK yang objeknya belum tercantum dalam perencanaan pembangunandaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengatasi kondisi darurat;</li> <li>b. mendukung pelaksanaan program strategis nasional; dan/atau</li> <li>c. melaksanakan penugasan berdasarkan asas tugas Pembantuan.</li> </ul> <p>(4) Objek dan pelaksanaan KSDPK tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, kepentingan nasional, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> |            |
|     |   | Bagian Keempat<br>Studi Kelayakan   |            |
| 35. |   | Pasal 17  |            |
|     |   | <p>Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari daerah, daerahmelakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pemetaan urusan pemerintahan sesuai potensi dankarakteristik daerah serta kebutuhan daerah; dan</li> <li>b. penyusunan rusunan studi kelayakan sesuai denganketentuan peraturan perundang undangan.</li> </ul>  |            |
| 36. |   | Pasal 18  |            |
|     |   | <p>(1) Dalam hal prakarsa KSDPK berasal dari pihak ketiga, KSDPK harus memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. terintegrasi secara teknis dengan rencana induk;</li> <li>b. pada sektor yang bersangkutan;</li> <li>c. layak secara ekonomi dan finansial; dan</li> <li>d. c. pihak ketiga yang mengajukan prakarsa memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan kerja sama.</li> </ul> <p>(2) Pihak ketiga yang menjadi pemrakarsa harus menyusun studi kelayakan kerja sama yang diusulkan.</p>   |            |
|     |   | Bagian Kelima<br>Tahapan dan Dokumen Kerja Sama   |            |
| 37. |   | Pasal 19  |            |
|     |   | <p>(1) Ketentuan mengenai tahapan dan dokumen kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan dan dokumen kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.</p>  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   | (2) Khusus dokumen kerja sama yang berupa kontrak/perjanjian kerja sama paling sedikit memuat:<br>a. hak dan kewajiban parapihak;<br>b. jangka waktu kerja sama;<br>c. penyelesaian perselisihan; dan<br>d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.   |            |
|     |   | Bagian Keenam<br>Hasil KSDPK  |            |
| 38. |   | Pasal 20  |            |
|     |   | (1) Hasil KSDPK dapat berupa uang dan/atau barang.<br>(2) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa Uang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) Hasil KSDPK yang menjadi hak daerah berupa barang dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  |            |
|     |   | Bagian Ketujuh<br>Penyelesaian Perselisihan   |            |
| 39. |   | Pasal 21  |            |
|     |   | Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPK, Penyelesaiannya dilaksanakan dengan mengutamakan musyawarah mufakat dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam kontrak/perjanjian kerja sama serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |            |
|     |   | Bagian Kedelapan<br>Berakhirnya Kerja Sama  |            |
| 40. |   | Pasal 22  |            |
|     |   | (1) Ketentuan mengenai berakhirnya kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berlaku secara mutatis mutandis terhadap berakhirnya kerja sama dalam penyelenggaraan KSDPK.<br>(2) Selain berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPK berakhir karena:<br>a. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau<br>b. pihak ketiga dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | BAB IV<br>KERJA SAMA DENGAN PEMERINTAH DAERAH DI LUAR NEGERI<br>DAN KERJA SAMA DAERAH DENGAN LEMBAGA DI LUAR<br>NEGERI   |            |
|     |   | Bagian Kesatu<br>Umum  |            |
| 41. |   | Pasal 23   |            |
|     |   | (1) Dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL, daerah diwakili oleh gubernur atau bupati/wali kota yang bertindak untuk dan atas nama daerah.<br>(2) Objek KSDPL dan KSDLL terdiri atas:<br>a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;<br>b. pertukaran budaya;<br>c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;<br>d. promosi potensi daerah; dan<br>e. objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(3) KSDPL dan KSDLL dituangkan dalam naskah kerja sama. |            |
| 42. |   | Pasal 24   |            |
|     |   | KSDPL terdiri atas:<br>a. kerja sama provinsi kembar/bersaudara;<br>b. kerja sama kabupaten/kota kembar/bersaudara; dan<br>c. kerja sama lainnya.  |            |
| 43. |   | Pasal 25   |            |
|     |   | KSDLL Diselenggarakan:<br>a. atas dasar penerusan kerja sama Pemerintah pusat; atau<br>b. dalam bentuk kerja sama lainnya berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat.  |            |
| 44. |   | Pasal 26   |            |
|     |   | (1) Dalam hal penyelenggaraan KSDPL dan KSDLL terdapat hibah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(2) Dalam hal terdapat hasil KSDPL dan KSDLL berupa barang yang belum ditegaskan kepemilikannya dalam naskah kerja sama, daerah berkoordinasi dengan Menteri untuk penyelesaian kepemilikan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | (3) Dalam penyelesaian kepemilikan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri teknis terkait.   |            |
|     |   | Bagian Kedua<br>Persyaratan  |            |
| 45. |   | Pasal 27   |            |
|     |   | <p>(1) Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mempunyai hubungan diplomatik;</li> <li>b. merupakan urusan Pemerintah Daerah;</li> <li>c. Pemerintah Daerah tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri;</li> <li>d. pemerintah daerah di luar negeri dan lembaga diluar negeri tidak mencampuri urusan pemerintahan dalam negeri; dan</li> <li>e. sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan nasional dan daerah.</li> </ol> <p>(2) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dialihkan kesumber daya manusia Indonesia.</p> <p>(3) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KSDPL harus memenuhi persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kesetaraan status administrasi dan/atau kesetaraan wilayah;</li> <li>b. saling melengkapi; dan</li> <li>c. peningkatan hubungan antarmasyarakat.</li> </ol> |            |
|     |   | Bagian Ketiga<br>Prakarsa  |            |
| 46. |   | Pasal 28   |            |
|     |   | <p>(1) KSDPL dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah;</li> <li>b. pemerintah daerah di luar negeri; atau</li> <li>c. pemerintah daerah di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</li> </ol> <p>(2) Prakarsa KSDLL dapat berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pemerintah Daerah; atau</li> <li>b. pemerintah daerah di luar negeri atau lembaga di luar negeri melalui Menteri dan/atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri.</li> </ol>   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   | <p>(3) Berdasarkan prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepala daerah melakukan peninjauan untuk mengetahui peluang dan manfaat kerja sama bagi kepentingan daerah dan kepentingan nasional.</p> <p>(4) Dalam hal hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditindaklanjuti dengan pernyataan kehendak kerja sama, kepala daerah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri sebelum dilakukan penandatanganan pernyataan kehendak kerja sama.</p> <p>(5) Pernyataan kehendak kerja sama selagi dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana KSDPL atau KSDLL.</p> |            |
|     |   | Bagian Keempat<br>Penyelenggaraan KSDPL   |            |
|     |   | Paragraf 1<br>Umum  |            |
| 47. |   | Pasal 29  |            |
|     |   | <p>(1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaksanakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Menteri.</p>   |            |
|     |   | Paragraf 2<br>Rencana Kerja Sama  |            |
| 48. |   | Pasal 30  |            |
|     |   | <p>(1) KSDPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 harus memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(2) Kepala daerah menyampaikan surat permohonan persetujuan dengan melampirkan rencana kerja sama kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(3) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. subjek kerja sama;</li> <li>b. latar belakang;</li> <li>c. maksud, tujuan, dan sasaran;</li> <li>d. objek kerja sama;</li> <li>e. ruang lingkup kerja sama;</li> <li>f. sumber pembiayaan; dan</li> <li>g. jangka waktu pelaksanaan.</li> </ol>   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | <p>(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap rencana kerja sama diberikan dalam jangka waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak menerima surat permohonan dari kepala daerah.</p> <p>(5) Bentuk persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p>   |            |
| 49. |   | Pasal 31   |            |
|     |   | <p>(1) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri untuk mendapatkan pertimbangan.</p> <p>(2) Menteri melakukan verifikasi terhadap rencana kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Berdasarkan hasil verifikasi, Menteri memberikan pertimbangan secara tertulis kepada kepala daerah untuk ditindaklanjuti berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperbaiki rencana kerja sama; atau</li> <li>b. menyusun rancangan naskah kerja sama.</li> </ol>  |            |
|     |   | Paragraf 3<br>Penyusunan Rancangan Naskah KSDPL  |            |
| 50. |   | Pasal 32   |            |
|     |   | <p>(1) Rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan.</p> <p>(2) Dalam rangka memberikan persetujuan terhadap rancangan naskah kerja sama, Menteri menyelenggarakan rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk membahas rancangan naskah kerja sama.</p> <p>(3) Rapat antarkementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mengikutsertakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri;</li> <li>b. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait dengan objek kerja sama;</li> <li>c. Pemerintah Daerah provinsi yang bersangkutan; dan</li> <li>d. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</li> </ol> |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   | Paragraf 4<br>Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama  |            |
| 51. |   | Pasal 33  |            |
|     |   | <p>(1) Berdasarkan hasil rapat antarkementerian/lembaga rancangan naskah kerja sama yang telah disetujui kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.</p> <p>(2) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri atau pejabat yang ditunjuk membahas rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah daerah di luar negeri.</p> <p>(3) Dalam hal rancangan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri menyampaikan hasil pembahasan naskah kerja sama dan surat konfirmasi kepada Menteri.</p> <p>(4) Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penandatanganan naskah kerja sama oleh kepala daerah.</p> |            |
|     |   | Paragraf 5<br>Penyelesaian Perselisihan   |            |
| 52. |   | Pasal 34  |            |
|     |   | Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDPL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.   |            |
| 53. |   | Pasal 35  |            |
|     |   | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDPL diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.  |            |
|     |   | Bagian Kelima<br>Penyelenggaraan KSDLL  |            |
|     |   | Paragraf 1<br>Umum  |            |
| 54. |   | Pasal 36  |            |
|     |   | (1) KSDLL atas dasar penerusan kerja sama Pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 huruf a dilakukan oleh daerah dengan:   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | a. organisasi internasional;<br>b. lembaga nonprolit berbadan hukum di luar negeri; dan<br>c. mitra pembangunan luar negeri.<br>(2) Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak termasuk partai politik.<br>(3) KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<br>(4) KSDLL yang diselenggarakan berdasarkan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri selain lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1). |            |
| 55. |   | Pasal 37   |            |
|     |   | Pelaksanaan penerusan kerja sama Pemerintah Pusat dan persetujuan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dikoordinasikan oleh Menteri.   |            |
|     |   | Paragraf 2<br>Rencana Kerja Sama   |            |
| 56. |   | Pasal 38   |            |
|     |   | Ketentuan mengenai rencana kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rencana kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.  |            |
|     |   | Paragraf 3<br>Penyusunan Rancangan Naskah KSDLL  |            |
| 57. |   | Pasal 39   |            |
|     |   | Ketentuan mengenai penyusunan rancangan naskah kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan rancangan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.  |            |
|     |   | Paragraf 4<br>Pembahasan dan Penandatanganan Naskah Kerja Sama   |            |
| 58. |   | Pasal 40   |            |
|     |   | Ketentuan mengenai pembahasan dan penandatanganan naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan dan naskah kerja sama dalam penyelenggaraan KSDLL.   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN  |
|-----|--|---|---|
|     |  | Paragraf 5<br>Penyelesaian Perselisihan   |   |
| 59. |  | Pasal 41  |   |
|     |  | Jika terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan KSDLL, penyelesaiannya dilaksanakan melalui negosiasi dan konsultasi.   |   |
| 60. |  | Pasal 42  |   |
|     |  | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara KSDLL diatur dalam Peraturan Menteri yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.  |   |
|     |  | Bagian Keenam<br>Pelaporan Pelaksanaan KSDPL dan KSDLL  |   |
| 61. |  | Pasal 43  |   |
|     |  | (1) Pemerintah Daerah melaporkan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL kepada Menteri.<br>(2) Tata cara pelaporan pelaksanaan KSDPL dan KSDLL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.  |   |
|     | BAB IX<br>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN   | BAB V<br>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN   |   |
| 62. | Pasal 22   | Pasal 44  |   |
|     | (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.<br>(2) Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen terkait melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas kerja sama antardaerah provinsi atau antarkabupaten/kota dari lain provinsi.<br>(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari peninjauan, negosiasi, penandatanganan, pelaksanaan sampai pengakhiran kerja sama. | (1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri.<br>(2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.<br>(3) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.<br>(4) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat.<br>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), termasuk pemantauan dan evaluasi Kerja Sama Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. | PP No. 28/2018 mengatur lebih rinci pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN   |
|-----|--|--|--|
| 63. | Pasal 23   |  |  |
|     | Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam peraturan Menteri.   |  |  |
|     | BAB X<br>BADAN KERJA SAMA  | BAB VI<br>KETENTUAN LAIN-LAIN  |  |
| 64. | Pasal 24   | Pasal 45   |  |
|     | <p>(1) Dalam rangka membantu kepala daerah melakukan kerja sama dengan daerah lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, kepala daerah dapat membentuk badan kerja sama.</p> <p>(2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan perangkat daerah.</p> <p>(3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.</p>  | <p>(1) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung Kerja Sama Daerah.</p> <p>(2) Pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>   | PP No. 28/2018 tidak mengatur mengenai pembentukan Badan kerja sama, akan tetapi mengatur mengenai pembentukan Asosiasi dalam rangka mendukung kerja sama daerah |
| 65. | Pasal 25   | Pasal 46   |  |
|     | <p>(1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas:</p> <p>a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;</p> <p>b. memberikan masukan dan saran kepada kepala daerah masing-masing mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan apabila ada permasalahan; dan</p> <p>c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala daerah masing-masing.</p> <p>(2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama kepala daerah yang melakukan kerja sama.</p> | <p>(1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dukungan program sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berkaitan dengan pemberian bantuan dana dan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(3) Pendanaan dalam rangka sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan.</p> <p>(4) Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen kesepakatan yang mengikat paripihak.</p> |  |
| 66. |  | Pasal 47   |  |
|     |  | Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat dalam rangka penyelenggaraan Kerja Sama Daerah, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keistimewaan dan kekhususan daerah tersebut.  |  |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     | BAB XI<br>KETENTUAN PERALIHAN   | BAB VII<br>KETENTUAN PERALIHAN  |            |
| 67. | Pasal 26  | Pasal 48  |            |
|     | Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, kerjasama antardaerah yang sedang berjalan tetap berlakusampai dengan berakhirnya kerja sama.  | Kontrak/perjanjian kerja sama untuk KSDD, KSDPK,KSDLL, dan KSDPL yang telah ditandatangani bersamasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.  |            |
| 68. | Pasal 27  | Pasal 49  |            |
|     | Pada saat ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini, makapenyelesaian perselisihan kerja sama antardaerah yangada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, diselesaikan sesuai Peraturan Pemerintah ini. | Kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerahdan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersamasebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, tetapberlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama dan dapatdilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan danpelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.  |            |
|     | BAB XII<br>KETENTUAN PENUTUP  | BAB VIII<br>KETENTUAN PENUTUP   |            |
| 69. |   | Pasal 50  |            |
|     |   | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semuaperaturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. |            |
| 70. |   | Pasal 51  |            |
|     |   | Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761) dicabutdan dinyatakan tidak berlaku.  |            |
| 71. | Pasal 28  | Pasal 52  |            |
|     | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  | Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  |            |
|     | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.   | Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|--|--|------------|
|     | <p>Ditetapkan di Jakarta<br/>pada tanggal 6 Juni 2011<br/>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>DR.H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO</p>                 | <p>Ditetapkan di Jakarta<br/>pada tanggal 12 Juli 2018<br/>PRESIDEN REPUBUK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>JOKO WIDODO</p>                                      |            |
|     | <p>Diundangkan di Jakarta<br/>pada tanggal 6 Juni 2011<br/>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASIMANUSIA<br/>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>PATRIALIS AKBAR</p> | <p>Diundangkan di Jakarta<br/>pada tanggal 13 Juli 2018<br/>MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA<br/>REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>ttd.</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p> |            |
|     | <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011<br/>NOMOR 59</p>  | <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR<br/>97</p>  |            |

**PENJELASAN**

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| 1.  | PENJELASAN<br>ATAS<br>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG<br>TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMADAERAH   | PENJELASAN<br>ATAS<br>PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA<br>NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG<br>KERJA SAMADAERAH  |            |
| 2.  | I. UMUM   | I. UMUM  |            |
|     | <p>Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menyelenggarakan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dengan asas desentralisasi kewenangan Pemerintah diserahkan kepada daerah otonom dan daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga.</p> <p>Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal.</p> <p>Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangikesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antardaerah dan daerah tertinggal.</p> <p>Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum. Objek kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk kerja sama yang akan dilaksanakan.</p> <p>Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas</p> | <p>Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa Kerja Sama Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Kerja Sama Daerah dapat dilakukan dengan daerah lain, pihak ketiga, dan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri.</p> <p>Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah juga dimaksudkan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterkaitan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, menyinergikan potensi antardaerah, daerah dengan pihak ketiga, dan daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri sertameningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal daerah. Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri merupakan kerja sama internasional dan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Selain itu, melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat mengurangikesenjangan antardaerah dalam penyediaan pelayanan publik khususnya yang ada di wilayah terpencil, daerah yang berbatasan, dan daerah tertinggal.</p> <p>Meningat Undang Undang Pemerintahan Daerah tidak mengatur kerja sama antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam peraturan pemerintah ini ditegaskan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang membutuhkan dukungan program Pemerintah pusat dan pemerintah Daerah dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Untuk kepastian hukum, kontrak/perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang telah ditandatangani bersama sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan</p> |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     | daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak dapat atau mempengaruhi atas pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya.  | berakhimya kerja sama dan dapat dilanjutkan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai penyelenggaraan Kerja Sama Daerah dengan daerah lain, Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, dan Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah atau lembaga di luar negeri serta pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah. |            |
| 3.  | II. PASAL DEMI PASAL  | III. PASAL DEMI PASAL  |            |
| 4.  | Pasal 1<br>Cukup jelas.   | Pasal 1<br>Cukup jelas.  |            |
| 5.  | <p>Pasal 2</p> <p>Huruf a<br/>Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.</p> <p>Huruf b<br/>Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Huruf b<br/>Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah upaya pemerintah daerah melalui kerja sama untuk mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Huruf c<br/>Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah upaya untuk terwujudnya harmoni antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk melakukan kerja sama demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.</p> <p>Huruf d<br/>Yang dimaksud dengan “saling menguntungkan” adalah pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.</p> |  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     | <p>Huruf e<br/>Yang dimaksud dengan “keepakatan bersama” adalah persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.</p> <p>Huruf f<br/>Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.</p> <p>Huruf g<br/>Yang dimaksud dengan “mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah seluruh pelaksanaan kerja sama daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>Huruf h<br/>Yang dimaksud dengan “persamaan kedudukan” adalah persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.</p> <p>Huruf i<br/>Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah adanya proses keterbukaan dalam kerja sama daerah.</p> <p>Huruf j<br/>Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama daerah.</p> <p>Huruf k<br/>Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama daerah.</p> |   |            |
| 6.  | Pasal 3<br>Cukup jelas.   | Pasal 2<br>Cukup jelas.                             |            |
| 7.  |   | Pasal 3<br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)     |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | <p>Yang dimaksud dengan "memiliki eksternalitas lintas Daerah" adalah urusan pemerintahan yang pelaksanaannya menimbulkan dampak/akibat lintas.</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p>   |            |
| 8.  | <p>Pasal 4<br/>Yang dimaksud dengan "pelayanan publik" adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.</p> | <p>Pasal 4<br/>Ayat (1)<br/>Cukup jelas.<br/>Ayat (2)<br/>Cukup jelas.<br/>Ayat (3)<br/>Huruf a<br/>Yang dimaksud dengan "kondisi darurat" adalah Kondisi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana.<br/>Huruf b<br/>Cukup jelas.<br/>Huruf c<br/>Cukup jelas.<br/>Ayat (4)<br/>Cukup jelas.</p> |            |
| 9.  | <p>Pasal 5<br/>Cukup jelas.</p>   |  |            |
| 10. | <p>Pasal 6<br/>Cukup jelas.</p>   |  |            |
| 11. | <p>Pasal 7<br/>Cukup jelas.</p>   | <p>Pasal 5<br/>Cukup jelas.</p>  |            |
| 12. | <p>Pasal 8<br/>Cukup jelas.</p>   |  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   |   |            |
| 13. |   | Pasal 6<br>Cukup jelas.                             |            |
| 14. | <p>Pasal 9</p> <p>Yang dimaksud dengan “membebani daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.</p> <p>Yang dimaksud dengan “membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.</p> <p>Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah.</p> |   |            |
| 15. | Pasal 10<br>Cukup jelas.  |   |            |
| 16. | <p>Pasal 11</p> <p>Ayat (1)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)<br/>Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.</p> <p>Ayat (3)<br/>Tembusan surat dimaksudkan untuk diketahui oleh pembina dan pengawas kerja sama daerah, dengan demikian pembina dan pengawas kerja sama daerah dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap suatu rancangan kerja sama daerah.</p>  |   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 17. | <p>Pasal 12</p> <p>Ayat (1)<br/>Salah satu fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama. Waktu 45 (empat puluh lima) hari dianggap cukup untuk dilakukan penilaian apakah rencana kerja sama daerah telah memenuhi prinsip kerja sama atau tidak.</p> <p>Ayat (2)<br/>Pelaksanaan kerja sama daerah memerlukan ketepatan dan kecepatan. Apabila menurut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah rencana kerja sama daerah kurang memenuhi prinsip kerja sama, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menyampaikan pendapat dan sarannya.</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (6)<br/>Cukup jelas.</p> |   |            |
| 18. |  | <p>Pasal 7</p> <p>Ayat (1)<br/>Cukup jelas</p> <p>Ayat (2)<br/>Huruf a<br/>Cukup jelas.<br/>Huruf b<br/>Yang dimaksud dengan “memiliki kompleksitas Tinggi” adalah daerah yang melakukan kerja sama lebih dari 2 (dua) daerah dan/atau Objek kerja sama yang dikerjasamakan lebih dari 2 (dua) objek.<br/>Huruf c<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (5)<br/>Cukup jelas.</p> |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH   | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 19. | Pasal 13<br>Cukup jelas.  |   |            |
| 20. | Pasal 14<br>Ayat (1)<br>Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan pemerintah.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. | Pasal 8<br>Cukup jelas.   |            |
| 21. | Pasal 15<br>Ayat (1)<br>Gubernur dalam menyelesaikan perselisihan tersebut dapat berkonsultasi dengan Pemerintah.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas. |   |            |
| 22. | Pasal 16<br>Cukup jelas.  |   |            |
| 23. | Pasal 17<br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.  |   |            |
| 24. | Pasal 18<br>Cukup jelas.  | Pasal 9<br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Yang dimaksud dengan “tidak dapat berakhir meskipun terjadi pergantian kepemimpinan” adalah bahwa kerja sama daerah tetap dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam dokumen kerja sama dan tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian kepala daerah maupun tidak terpengaruh oleh terjadinya pergantian pejabat yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen kerja sama. |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH  | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|--|---|------------|
| 25. | Pasal 19<br>Cukup jelas.   |   |            |
| 26. | Pasal 20<br>Yang dimaksud dengan “kerja sama daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di daerah” adalah bahwa kerja sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian kepala daerah. |   |            |
| 27. | Pasal 21<br>Cukup jelas.   |   |            |
| 28. |  | Pasal 10<br>Cukup jelas.  |            |
| 29. |  | Pasal 11<br>Cukup jelas.  |            |
| 30. |  | Pasal 12<br>Ayat (1)<br>Bantuan dana kepada daerah untuk melaksanakan kerjasama wajib melalui anggaran pendapatan dan belanja negara dilaksanakan oleh menteri yang diberikan kewenangan sebagai bendahara umum negara.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |            |
| 31. |  | Pasal 13<br>Cukup jelas.  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 32. |   | Pasal 14<br>Huruf a<br>Cukup jelas.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan “badan usaha yang berbadan Hukum” antara lain badan usaha milik negara, badan Usaha milik daerah , koperasi , dan badan hukum swasta.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.   |            |
| 33. |   | Pasal 15<br>Cukup jelas.  |            |
| 34. |   | Pasal 16<br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan “kondisi darurat” adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia, antara lain terjadinya bencana<br>Huruf b<br>Cukup jelas.<br>Huruf c<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |            |
| 35. |   | Pasal 17<br>Cukup jelas.  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 36. |   | Pasal 18<br>Cukup jelas.                            |            |
| 37. |   | Pasal 19<br>Cukup jelas.                            |            |
| 38. |   | Pasal 20<br>Cukup jelas.                            |            |
| 39. |   | Pasal 21<br>Cukup jelas.                            |            |
| 40. |   | Pasal 22<br>Cukup jelas.                            |            |
| 41. |   | Pasal 23<br>Cukup jelas.                            |            |
| 42. |   | Pasal 24<br>Cukup jelas.                            |            |
| 43. |   | Pasal 25<br>Cukup jelas.                            |            |
| 44. |   | Pasal 26<br>Cukup jelas.                            |            |
| 45. |   | Pasal 27<br>Ayat (1)<br>Huruf a<br>Cukup jelas.     |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | <p>Huruf b<br/>Cukup jelas.</p> <p>Huruf c<br/>Yang dimaksud dengan "tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri" adalah tidak membuka kantor yang didirikan/disewa di luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lainnya termasuk dari pihak mitra.</p> <p>Huruf d<br/>Cukup jelas.</p> <p>Huruf e<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (2)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>Huruf a<br/>Cukup jelas.</p> <p>Huruf b<br/>Yang dimaksud dengan "saling melengkapi" adalah memanfaatkan potensi atau kelebihan masing-masing pihak untuk saling melengkapi dan saling menguntungkan.</p> <p>Huruf c<br/>Cukup jelas</p> |            |
| 46. |   | <p>Pasal 28<br/>Cukup jelas.</p>   |            |
| 47. |   | <p>Pasal 29<br/>Cukup jelas.</p>   |            |
| 48. |   | <p>Pasal 30<br/>Cukup jelas.</p>   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
| 49. |   | Pasal 31<br>Cukup jelas.  |            |
| 50. |   | Pasal 32<br>Cukup jelas.  |            |
| 51. |   | Pasal 33<br>Ayat (1)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Yang dimaksud dengan “surat konfirmasi” adalah surat yang menyatakan naskah kerja sama telah sesuai dengan aspek politis dan yudiris yang berkaitan dengan hubungan kerja sama luar negeri.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas.     |            |
| 52. |   | Pasal 34<br>Cukup jelas.  |            |
| 53. |   | Pasal 35<br>Cukup jelas.  |            |
| 54. |   | Pasal 36<br>Ayat (1)<br>Huruf a<br>Yang dimaksud dengan “organisasi Internasional” adalah organisasi antarpemerintah.<br>Huruf b<br>Yang dimaksud dengan “lembaga nonprofit berbadan hukum di luar negeri” antara lain organisasi kemasyarakatan badan hukum yayasan asing atau sebutan lainnya dan lembaga |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH   | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   | <p>swadaya masyarakat berbadan hukum asing di luar negeri.</p> <p>Huruf c<br/>Yang dimaksud dengan “Mitra pembangunan luar negeri” adalah lembaga di bawah naungan Pemerintah luar negeri.</p> <p>Ayat (2)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (3)<br/>Cukup jelas.</p> <p>Ayat (4)<br/>Yang dimaksud dengan “lembaga di luar negeri” misalnya lembaga pendidikan diluar negri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> |            |
| 55. |   | Pasal 37<br>Cukup jelas.  |            |
| 56. |   | Pasal 38<br>Cukup jelas.  |            |
| 57. |   | Pasal 39<br>Cukup jelas.  |            |
| 58. |   | Pasal 40<br>Cukup jelas.  |            |
| 59. |   | Pasal 41<br>Cukup jelas.  |            |
| 60. |   | Pasal 42<br>Cukup jelas.  |            |
| 61. |   | Pasal 43<br>Cukup jelas.  |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH  | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
| 62. | Pasal 22<br>Cukup jelas.  | Pasal 44<br>Cukup jelas.   |            |
| 63. | Pasal 23<br>Cukup jelas.  |  |            |
| 64. | Pasal 24<br>Cukup jelas.  | Pasal 45<br>Cukup jelas.   |            |
| 65. | Pasal 25<br>Cukup jelas.  | Pasal 46<br>Ayat (1)<br>Ketentuan ini dimaksudkan antara lain untuk program atau kegiatan pemerintahan yang wajib diselenggarakan sebagai satu kesatuan namun mencakup kewenangan dari tingkatan dan susunan pemerintahan yang berbeda dilaksanakan melalui sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.<br>Yang dimaksud dengan “dukungan program” misalnya Dukungan program yang merupakan kewenangan Pemerintah pusat kepada daerah atau dukungan program yang merupakan kewenangan daerah kepada Pemerintah Pusat yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan agar program yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.<br>Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang undangan mengenai perencanaan dan penganggaran.<br>Ayat (2)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (3)<br>Cukup jelas.<br>Ayat (4)<br>Cukup jelas. |            |
| 66. |   | Pasal 47<br>Cukup jelas.   |            |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH | KETERANGAN |
|-----|---|---|------------|
|     |   |   |            |
| 67. | Pasal 26<br>Cukup jelas.  | Pasal 48<br>Cukup jelas.                            |            |
| 68. | Pasal 27<br>Cukup jelas.  | Pasal 49<br>Cukup jelas.                            |            |
| 69. |   | Pasal 50<br>Cukup jelas.                            |            |
| 70. |   | Pasal 51<br>Cukup jelas.                            |            |
| 71. | Pasal 28<br>Cukup jelas.  |   |            |

| <b>No.</b> | <b>PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br/>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH</b> | <b>PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br/>TENTANG KERJA SAMA DAERAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|---|---|-------------------|
|            |   |   |                   |

| <b>No.</b> | <b>PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br/>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH</b> | <b>PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br/>TENTANG KERJA SAMA DAERAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |
|------------|---|---|-------------------|
|            |   |   |                   |

| No. | PP NOMOR 50 TAHUN 2007<br>TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KERJA SAMA DAERAH | PP NOMOR 28 TAHUN 2018<br>TENTANG KERJA SAMA DAERAH    | KETERANGAN |
|-----|---|--|------------|
|     |   | Pasal 52<br>Cukup jelas.                               |            |
|     | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4761                    | TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6219 |            |